



**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MELALUI MUSYAWARAH DESA  
(MUSDES) DI DESA TANETE KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**ANALYSIS OF PUBLIC PARTICIPATION IN PREPARATION OF VILLAGE REVENUE  
AND EXPENDITURE BUDGET (APBDES) THROUGH VILLAGE DELIBERATION  
(MUSDES) IN DESA TANETE KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**Muhajir<sup>1</sup>, Romy Nugraha JS<sup>2</sup>, Lisra<sup>3</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Email: <sup>1</sup> [muhajirmuin17@gmail.com](mailto:muhajirmuin17@gmail.com), <sup>2</sup> [romynugraha7@gmail.com](mailto:romynugraha7@gmail.com), <sup>3</sup> [lisra.lisda@gmail.com](mailto:lisra.lisda@gmail.com)

**Abstract**

*In the implementation of the village deliberation only a few participants were present and it was confirmed that the aspirations of the community were represented by each hamlet head. So it is possible that there is information that does not reach the village government. This also contradicts the regulation which states that elements of society must be involved in village deliberations. Therefore, the purpose of this study was to determine community participation in the preparation of the Village Budget in Tanete Village. The type of research used is a qualitative method with a phenomenological approach. The results of this study indicate that community participation in the preparation of the Village Budget is less active. The activeness or inactivity of the community can also be seen in the preparation of the Village Budget through three forms of participation, namely: (1) Participation of thought, the community in conveying ideas to the village government only the majority participate, (2) Participation of labor, this participation is only part of the community ready to participate if needed and some people are not directly involved or do not care, (3) Participation of expertise, shows that there is no participation of expertise from the community because the community itself does not or does not yet have the expertise. The level of community participation in the preparation of the Village Budget is at the 5th level, namely placation or reassurance. Where it can be interpreted as a communication process accompanied by negotiations between the village government and the community. The community is then given an understanding that all proposals cannot be realized, due to limited resources and will be made based on a priority scale.*

**Keywords:** *Community Participation, Village Budget, Village Deliberation*

**ABSTRAK**

Pada pelaksanaan musyawarah desa hanya beberapa peserta yang hadir dan dikonfirmasi bahwa aspirasi masyarakat itu diwakili oleh masing-masing kepala dusun. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya informasi yang tidak sampai kepada pemerintah desa. hal ini juga bertentangan dengan regulasi yang mengatakan bahwa unsur masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah desa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Tanete. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada penyusunan APBDes kurang aktif. Keaktifan maupun ketidakaktifan masyarakat juga dapat dilihat dalam penyusunan APBDes melalui tiga bentuk partisipasi yaitu: (1) Partisipasi pemikiran, masyarakat dalam menyampaikan pemikiran kepada pemerintah desa hanya sebagian besar yang ikut berpartisipasi, (2) Partisipasi tenaga, partisipasi ini hanya sebagian masyarakat siap berpartisipasi apabila dibutuhkan dan sebagian juga masyarakat tidak terlibat langsung bahkan tidak peduli, (3) Partisipasi keahlian, menunjukkan bahwa tidak adanya partisipasi keahlian dari masyarakat dikarenakan masyarakat sendiri yang tidak atau belum memiliki keahlian tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes berada pada tingkat ke-5 yaitu *placation* atau penentraman. Di mana dapat diartikan adanya proses komunikasi yang disertai negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat





selanjutnya diberikan pemahaman bahwa semua usulan tidak mungkin direalisasikan, karena terbatasnya sumber daya dan akan dibuat berdasarkan skala prioritas.

**Kata kunci :** *Partisipasi Masyarakat, APBDes, Musyawarah Desa*

## **PENDAHULUAN**

Era reformasi memberi dampak yang sangat besar dalam kehidupan bernegara khususnya pada bidang pemerintahan. Di Indonesia sejak berubahnya orde baru ke era reformasi sistem pemerintahan mengalami perubahan dinamika darinya kebijakan tingkat pusat ke tingkat daerah. Kebijakan yang sebelumnya itu di atur pemerintah pusat (sentralisasi) kemudian selanjutnya beralih ke sistem desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sendiri. Sehingga berlakunya sistem desentralisasi, sangat diharapkan partisipasi masyarakat turut terlibat dalam proses demokrasi membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi setiap anggota masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat (Riskayanti, 2021). Sehingga kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah.

Adanya pemberian kewenangan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam mengatur dan menyelesaikan segala urusan pemerintahan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sehingga kewenangan tersebut juga dikenal dengan otonomi daerah. Dengan kebijakan tersebut akan menjadi sangat penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat (G. CAROL MUHAMMAD, 2020). Sehingga kebijakan yang dimaksud diatas sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan termasuk wujud implemmentasi dari sistem pemerintahan demokrasi yaitu sari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan khususnya pemerintah desa menyebabkan keputusan yang diambil itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana didalamnya pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan dan politik memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan APBDes.

Pelaksanaan APBDes berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang baik pada suatu daerah karena bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam APBDes. Dalam penyusunan APBDes keterlibatan masyarakat akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut (Mansur et al., 2021). Penyusunan APBDes yang di dasarkan pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 tahun 2007 merupakan tahap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif. Partisipasi masyarakat sangat penting



dan dibutuhkan dalam proses penyusunan Anggaran karena seperti yang diketahui bahwa anggaran merupakan arah pemerintah menentukan kebijakan yang diwujudkan melalui Langkah-langkah nyata dalam setiap pembangunan daerah. Oleh karena itu, APBDes seharusnya mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun daerahnya dan sesuai amanat Permendagri No. 37 tahun 2007.

Peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat efektif dan efisien sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa peraturan desa, termasuk APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui proses musyawarah Desa (musdes). Pasal 54 ayat (1) menyebutkan musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur masyarakat desa, untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan APBDes melalui musyawarah desa (musdes).

Berdasarkan hasil pemantauan melalui musyawarah Desa yakni penetapan rapat kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang dilaksanakan di kantor desa Tanete ditemukan ada beberapa peserta yang hadir dan dikonfirmasi bahwa aspirasi masyarakat itu diwakili oleh masing-masing kepala dusun. Namun, walaupun masyarakat diwakili oleh pihak-pihak tertentu pada proses penyusunan APBDes itu tidak menutup kemungkinan adanya informasi yang tidak sampai kepada pemerintah desa. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa unsur masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah desa. Forum musyawarah desa diharapkan dapat menjangkau aspirasi masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan fenomena ini dalam penelitian akan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat desa berpartisipasi dan memiliki prakarsa serta kreativitas dalam penyusunan APBDes-nya. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa karena dengan informasi langsung dari masyarakat akan memudahkan pihak pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program yang direncanakan berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh teori tentang kontrak sosial dari Rousseau dan teori tangga partisipasi dari Arnstein. Dimana kontrak sosial merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis atau persetujuan yang bersangsi hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Dari teori inilah akan membantu peneliti dalam melihat keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang partisipasi masyarakat antara lain Laode Suaparno (2020). Membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian yaitu: Partisipasi Buah Pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian. Faktor pendukung yaitu, tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan dan Jenis Pekerjaan. Faktor penghambat yaitu tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa, tidak dilibatkannya setiap masyarakat dalam kegiatan musyawarah.

Pada penelitian ini merujuk pada teori tangga partisipasi dari Arnstein dan teori penganggaran partisipasi Wampler. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan kualitas partisipasi masyarakat desa sasakpanjang masih pada level peredaman dalam degree of tokenism. Dimana masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap keputusan dalam APBDes, tetapi masih bersifat artifisial dan belum mampu mengontrol keutusan APBDes. Adapun faktor-faktor yang menghambat antara lain, lemahnya institusi pemerintah desa, budaya masyarakat, ketiadaan leadership dan praktik pendampingan desa yang perlu di optimalkan karena masih bersifat administratif.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Peneliti memakai metode kualitatif karena metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian tersebut sangat menekankan pada aspek pemahaman masalah secara mendalam dengan cara menganalisis data yang sudah dikumpulkan melalui informasi dari informan sebagai bagian proses penelitian.

Moleong dalam (Nugraha, 2019) memberikan pandangan tentang pendekatan kualitatif yakni seorang peneliti harus mampu memahami fenomena dari objek penelitian, seperti perilaku individu, motivasi, persepsi dan lainnya secara menyeluruh sehingga mampu menjelaskan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sesuai dengan konteks dalam berbagai metode penelitian.

Menurut Edmund Husserl, fenomenologi merupakan pendekatan dalam penelitian berdasarkan hasil interpretasi dari sudut pandang peneliti. Fenomenologi berusaha menggambarkan pengalaman manusia sesuai dengan yang dialami baik melalui pikiran, emosi, hasrat dan lainnya. Selanjutnya beliau memandang bahwa fenomenologi juga menganalisis kehidupan individu sebagaimana seperti ia mengalaminya sebagai subjek maupun objek penelitian. (Tumangkeng & Maramis, 2022).

### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) melalui musyawarah desa (musdes) di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada penelitian ini akan mewawancarai beberapa informan yang dianggap penting dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam pengambilan sample sebagai sumber informasi dan ditentukan berdasarkan pertimbangan. Adapun data yang digunakan terbagi 2 yaitu data primer dan data sekunder

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode dalam memperoleh informasi yang terkait dengan objek penelitian. Bahan yang dipakai dalam metode penelitian yakni bersumber dari berbagai kepustakaan seperti artikel, jurnal, buku digital melalui



internet dengan website resmi dan sumber yang berkaitan dengan tema yang di angkat. Penelitian ini menggunakan metode survey secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data serta melakukan wawancara. Wawancara, dokumentasi dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Berikut kami jelaskan penelitian yang telah dilakukan

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Observasi berarti mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi atau tempat dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengambilan informasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Proses wawancara sebaiknya dilakukan dengan bertemu secara langsung sehingga mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dalam bentuk gambar atau potret terhadap objek yang diteliti. Dokumen yang menjadi sumber penelitian bagi penulis yakni yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan penulis. Bentuk dokumen tersebut berupa arsip, absen dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penelitian.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan bentuk dalam menganalisa hasil penelitian dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif akan memberikan suatu gambaran tentang informasi terkait masalah secara detail dan mendalam guna menghasilkan data kualitatif yang baru. Dari hasil informasi diatas selanjutnya akan diinterpretasikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan dukungan teori yang diangkat. Analisis data akan diawali dengan melihat interaksi masyarakat dengan pihak pemerintah desa ditinjau dari teori kontrak sosial dan diakhiri dengan melihat secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat ketika ditinjau melalui teori kontrak sosial.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (PEBRISAL, 2020) diaplikasikan dengan mengikuti tiga alur berikut:

#### 1. *Reduction* /Reduksi Data

Reduksi data yakni mengumpulkan semua data yang didapatkan pada saat wawancara dan turun langsung ke lokasi penelitian. Dari semua data yang didapatkan di lapangan itu tidak semua di masukkan tetapi akan dilakukan pemilahan data yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat. Sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti dan memudahkan dalam mengumpulkan data.

#### 2. *Display*/Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses kelanjutan setelah peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Penyajian data ini dilakukan dengan cara



mengurai data kemudian menghubungkan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering menyajikan dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Verification*/Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan dalam proses pengumpulan data merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian. Dimana kesimpulan di awal penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah menjadi kesimpulan akhir setelah data semua dicantumkan dari lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Melalui Musyawarah Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan sebuah dokumen publik yang sudah semestinya disusun secara partisipatif. Dimana rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah dilibatkan berpartisipasi dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan juga dilibatkan ikut bermusyawarah untuk apa keuangan desa dibelanjakan. Sehingga harapan tentang anggaran yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar bisa terwujud dan juga diharapkan pada proses penyusunan APBDes dengan keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Maka partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Konsep demokratisasi yang dimaksudkan disini adalah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung, masyarakat harus ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan APBDes.

Partisipasi masyarakat pada penelitian ini akan dibahas secara mendalam dengan menggunakan teori kontrak sosial, dimana teori ini memiliki arti setiap individu-individu punya kepentingan yang tidak sama sehingga dia harus melibatkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai kepentingan yang diharapkan. Sehingga ketercapaian kepentingan individu memaksa dirinya melakukan kontrak dengan lingkungannya itulah yang disebut sebagai kontrak sosial. Dimana pemerintah desa dan unsur masyarakat memiliki kepentingan sehingga kedua pihak tersebut melakukan suatu interaksi untuk mewujudkan masing-masing kepentingannya. Dengan teori ini, peneliti akan melihat keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah desa.

Pemerintahan desa setiap tahunnya wajib melakukan penyusunan APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa Tanete dapat dilihat dari bagaimana kontribusi masyarakat dalam menghadiri kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanete dalam rangka menyusun program-program pembangunan bagi desa Tanete setiap tahun.

Pada dasarnya pemerintah desa sudah menjalankan penyusunan APBDes melalui musyawarah desa sesuai dengan mekanisme yang ada. Dimana pemerintah desa sudah mengundang ketua BPD beserta anggotanya, kepala dusun dan unsur masyarakat. Namun, kenyataannya terdapat kendala yaitu adanya masyarakat yang tidak ikut andil



atau tidak hadir dalam penyusunan APBDes karena alasan bahwa usulannya tidak mendapat respon dari pemerintah desa. Sehingga proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) semestinya disusun dengan partisipatif dengan keterlibatan semua unsur masyarakat dapat mewujudkan masing-masing kebutuhannya atau kepentingannya. Hal tersebut sesuai dengan teori kontrak sosial yang mengatakan bahwa pemerintah desa dan unsur masyarakat memiliki kepentingan sehingga kedua pihak tersebut melakukan suatu interaksi untuk mewujudkan masing-masing kepentingannya.

Dari pernyataan beberapa indormant diatas bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat pada penyusunan APBDes kurang aktif. Sehingga keaktifan maupun ketidakaktifan masyarakat juga dapat diukur dalam penyusunan APBDes melalui tiga bentuk partisipasi yakni partisipasi pemikiran, tenaga dan keahlian. Peneliti akan menjabarkan secara mendalam pada hasil wawancara dibawah ini:

#### 1. Partisipasi Pemikiran

Partisipasi pemikiran dapat dimaknai sebagai sebuah keterlibatan, keikutsertaan semua elemen masyarakat pada suatu program tertentu baik secara langsung maupun tidak dengan maksud mencari solusi atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Terutama di zaman sekarang ini, dimana masyarakat turut andil dalam kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa demi kepentingan bersama.

Adapun bentuk partisipasi pemikiran yakni mengajukan usulan, saran atau kritik tentang suatu kegiatan pembangunan maupun kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi ini juga merupakan partisipasi berupa ide, gagasan, pendapat atau buah pikiran konstruktif baik untuk menyusun sebuah program berdasarkan kebutuhan dari masyarakat maupun memperlancar pelaksanaan program yang akan dikerjakan sehingga itu tidak luput dari kerja sama dari semua pihak.

Pada proses penyusunan APBDes dalam menyampaikan pemikiran kepada pemerintah desa hanya sebagian besar yang ikut berpartisipasi dan selebihnya anggota masyarakat yang selalu diundang mengikuti rapat. Akan tetapi masyarakat yang tidak terlibat langsung menyampaikan pendapatnya pada saat rapat itu disampaikan melalui masing-masing perwakilan kepala dusun dan anggota BPD disetiap dusunnya itu dikarenakan adanya regulasi yang mengatur sistem keterwakilan yakni diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa unsur masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah desa. Sehingga masyarakat sebagian yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada proses penyusunan APBDes di desa tanete akan tetapi belum mampu mempengaruhi keputusan yang diambil.

#### 2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga bisa diartikan sebagai suatu model partisipasi dengan melibatkan masyarakat desa yang memiliki potensi kemudian diarahkan pada proses peningkatan kualitas pembangunan desa, terkhusus pada perencanaan pembangunan yang ada didesa dalam hal ini penyusunan APBDes. Partisipasi tenaga juga dapat

diartikan sebagai usaha-usaha yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk tenaga untuk dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Partisipasi tenaga termasuk dalam bentuk partisipasi yang kedua, dimana keberadaan partisipasi tenaga diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada didesa baik berupa kerja bakti maupun pembangunan yang lain.

Partisipasi masyarakat pada proses penyusunan APBDes dalam bentuk tenaga yakni sebagian masyarakat siap berpartisipasi apabila dibutuhkan dan sebagian juga masyarakat tidak terlibat langsung bahkan tidak peduli. Seperti dilihat ketika masyarakat melakukan gotong royong hanya sedikit masyarakat yang ikut. Dalam masyarakat yang berpartisipasi melalui tenaga untuk membangun desa sebetulnya itu juga akan berdampak kemasyarakat sendiri, jadi masyarakat harus memahami bahwa pentingnya ikut terlibat dalam proses pembangunan yang ada di desanya. Sehingga diharapkan terjalinnya hubungan kerja sama baik dalam anggota masyarakat maupun dengan pihak pemerintah desa demi tujuan bersama.

### 3. Partisipasi Keahlian

Partisipasi keahlian dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat yang sangat potensial diarahkan kepada tujuan pembangunan desa. Partisipasi keahlian juga biasa disebut partisipasi keterampilan dimana individu maupun kelompok yang dalam masyarakat memberi dorongan melalui keterampilan yang di miliknya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan tujuan agar anggota masyarakat tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam proses penyusunan APBDes menggunakan keahliannya masing-masing akan memudahkan tercapainya tujuan dari Pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada proses penyusunan APBDes dalam bentuk keahlian yakni tidak adanya partisipasi keahlian dari masyarakat dikarenakan masyarakat sendiri yang tidak atau belum memiliki keahlian tersebut dan hanya sebagian saja yang memiliki keahlian tetapi itupun tidak pernah digunakan untuk menunjang pembangunan yang ada didesa. Sehingga kedepan pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat untuk menunjang program-program yang meningkatkan keahlian anggota masyarakat maupun pemerintah desa dengan melakukan pelatihan atau kegiatan pemberdayaan.

Maka dapat disimpulkan dari ketiga bentuk partisipasi diatas bahwa partisipasi pemikiran menjadi penyebab tingginya partisipasi masyarakat sedangkan partisipasi tenaga menurut data diatas menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dan partisipasi keahlian juga menunjukkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes di desa Tanete.

Maka berdasarkan kondisi diatas bahwa partisipasi masyarakat bisa diukur dengan menggunakan teori tangga partisipasi, dalam penyusunan APBDes dalam musyawarah desa Tanete terlihat dari delapan tangga partisipasi Arnstein yang menjadi tahapan alat analisis dalam mengidentifikasi partisipasi masyarakat yakni terdapat pada level tangga partisipasi masyarakat *Placation*. *Placation* atau penentruman suatu bentuk usaha untuk menampung ide,saran, masukan dari



masyarakat hanya sekedar meredam keresahan masyarakat. Dimana masyarakat memang diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya meskipun tidak diberikan kekuatan untuk memastikan bahwa pendapatnya lantas ditindak lanjuti. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari hasil wawancara dengan informan dan pengamatan langsung yang dilakukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes berada pada tingkat *placation* atau penentraman. Dimana penentraman diartikan adanya proses komunikasi yang disertai negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat selanjutnya diberikan pemahaman bahwa semua usulan tidak mungkin direalisasikan, karena terbatasnya sumber daya dan akan dibuat berdasarkan skala prioritas, serta tingkat kewenangan yang berada di pemerintah desa berbeda dengan kewenangan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 1. Partisipasi Pemikiran

Partisipasi pemikiran yaitu masyarakat berpartisipasi pada proses penyusunan APBDes dalam menyampaikan pemikiran kepada pemerintah desa hanya sebagian besar yang ikut berpartisipasi dan selebihnya anggota masyarakat yang selalu diundang mengikuti rapat. Akan tetapi masyarakat yang tidak terlibat langsung menyampaikan pendapatnya pada saat rapat itu disampaikan melalui masing-masing perwakilan kepala dusun dan anggota BPD di setiap dusunnya.

### 2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi masyarakat pada proses penyusunan APBDes dalam bentuk tenaga yakni sebagian masyarakat siap berpartisipasi apabila dibutuhkan dan sebagian juga masyarakat tidak terlibat langsung bahkan tidak peduli. Seperti dilihat ketika masyarakat melakukan gotong royong hanya sedikit masyarakat yang ikut.

### 3. Partisipasi Keahlian

Partisipasi masyarakat pada proses penyusunan APBDes dalam bentuk keahlian yakni menunjukkan tidak adanya partisipasi keahlian dari masyarakat dikarenakan masyarakat sendiri yang tidak atau belum memiliki keahlian tersebut dan hanya sebagian saja yang memiliki keahlian itupun juga tidak dipergunakan dalam proses pembangunan yang ada di desa.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa di desa tanete kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang, menunjukkan tingkat partisipasi Arstein berada pada tingkat ke-5 yaitu *Placation* atau penentraman. Dimana penentraman diartikan adanya proses komunikasi yang disertai negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat selanjutnya diberikan pemahaman bahwa semua usulan tidak mungkin direalisasikan, karena terbatasnya sumber daya dan akan dibuat berdasarkan skala prioritas, serta tingkat kewenangan yang berada di pemerintah desa berbeda dengan kewenangan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten.



## SARAN

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tanete sebaiknya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan APBDES dengan membuka ruang-ruang musyawarah yang ada setiap dusun dan melakukan sosialisasi terkait program desa kepada masyarakat. Karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan anggaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. ruang-ruang musyawarah. Selain itu, pemerintah desa juga terus melakukan koordinasi aktif secara berkala dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi dan persamaan persepsi dalam menyusun APBDES.
2. Masyarakat Desa Tanete juga seharusnya melibatkan dirinya sebagai anggota masyarakat pada berbagai kegiatan yang ada di desa demi kesejahteraan bersama. Di harapkan juga masyarakat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa secara baik demi menghindari adanya permasalahan dan masyarakat juga harusnya terlibat dalam penyusunan APBDES. Masyarakat juga ketika menemukan masalah dilapangan seharusnya menyampaikan kepada pihak pemerintah desa untuk bersama-sama mencari solusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- G. Carol Muhammad, N. I. M. 16340040. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)*. 139. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39313/>
- Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan Sektor Publik*.
- Irawan, A., & Sunandar, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. In *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 12, Issue 03). <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.244>
- Noniarti, H., Yuliana, E., Putra Arifin, M. H., Alimni, A., & Ismail, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1). <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10360>
- Nugraha, D. (2019). *Implementasi Pembinaan Nilai Nilai Pancasila Di Asrama Bina Siswa*





*Sma Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat.* 42–59.  
<http://repository.upi.edu/id/eprint/43592>

- Pebrisal, A. D. A. (2020). Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Disusun dan Diajukan Oleh. In *Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengurusan Data Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pelayanan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang*.
- Ramadhika Dwi Poetra. (2019). Bab Ii Tinjauan Pustaka Bab Ii Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Riskayanti. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *Studi Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 109.
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270.
- Sosiologi, P. S., Hukum, F., & Mataram, U. (2023). *Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*.
- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi : Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32.
- Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indoensia* ( Jakarta, Balai Pustaka, 1998), Cet Ke-1, h. 458